

KERJASAMA STAKEHOLDERS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM MENGATASI KELANGKAAN KAYU JALUR TAHUN 2019

Oleh : **Andrian Adi Wibowo**

Email: andrianadidid7@gmail.com

Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Indonesia memiliki banyak destinasi pariwisata yang sangat menarik. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi saat ini sedang berupaya dalam melestarikan Festival Pacu Jalur. Belakangan ini masyarakat di Kuantan Singingi merasakan susah mencari kayu untuk dijadikan jalur. Padahal pacu jalur adalah budaya dan tradisi besar yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang harus dipertahankan. Kerjasama stakeholders sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan atau pelestarian budaya pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi. Permasalahan yang terjadi dalam menangani kelangkaan kayu jalur adalah kurangnya kayu yang memiliki panjang 25-30 meter dengan diameter 1-2 meter dan harus menunggu kurang lebih 100 tahun. Jika kayu untuk bahan pembuatan kayu sudah habis, akan diganti dengan Fiber dan pasti mengurangi ciri khas pacu jalur yang sudah melekat.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif, Teknik pengumpulan data adalah wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil Penelitian yaitu Peran pemerintah daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan sangat penting, yaitu Pemerintah Daerah sebagai fasilitator, meningkatkan SDM, melakukan promosi, dan menyelenggarakan even daerah yang akan meningkatkan kesadaran Masyarakat dan Pemangku Adat untuk melestarikan budaya pacu jalur dengan cara menjaga hutan adat, membatasi pengambilan kayu jalur dan memperbaiki jalur. Pihak swasta berperan sebagai pendanaan Pacu Jalur dan memberikan bantuan bibit pohon untuk bahan pembuatan jalur. Sehingga kerjasama yang dibangun stakeholders dengan baik akan menciptakan komunikasi bersifat umpan balik, sistem yang terencana dengan baik, menumbuhkan rasa peduli masyarakat yang terbentuk dari pembinaan dan pengawasan. Kemudian ada beberapa faktor yang mendukung dalam mengatasi kayu untuk bahan pembuatan jalur dalam melestarikan kebudayaan festival Pacu jalur antara lain: (1) Menjaga hutan adat, (2) Suport pihak swasta, (3) dikenal wisatawan dalam ataupun luar negeri. Faktor penghambat yaitu: (1) Peran pemerintah daerah yang kurang maksimal, (2) Kualitas Sumber Daya Manusia, (3) Beralihnya fungsi hutan menjadi hutan industri.

Kata kunci: Pemerintah, Pihak Swasta, Masyarakat Adat, dan Kelangkaan Kayu.

**KERJASAMA STAKEHOLDERS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI DALAM MENGATASI KELANGKAAN KAYU JALUR
TAHUN 2019**

Oleh : Andrian Adi Wibowo

Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin,M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Indonesia has many very interesting tourism destinations. The Kuantan Singingi Regency Government is currently trying to preserve the Pacu Jalur Festival. Recently, the people of Kuantan Singingi have found it difficult to find wood to make pathways. Even though spur lanes are a big culture and tradition in Kuantan Singingi Regency that must be maintained. Stakeholder cooperation is urgently needed in efforts to develop or preserve the culture of spur lanes in Kuantan Singingi Regency. The problem that occurs in dealing with the scarcity of track timber is the lack of timber which has a length of 25-30 meters with a diameter of 1-2 meters and has to wait approximately 100 years. If the wood for wood-making materials runs out, it will be replaced with Fiber and will definitely reduce the characteristics of the existing runway path.

The research approach used in this study is a qualitative approach and uses descriptive research types. Data collection techniques are interviews, literature studies and documentation.

The role of the regional government of the Department of Tourism and Culture is very important, namely the Regional Government as a facilitator, increasing human resources, conducting promotions, and organizing regional events that will increase the awareness of the Community and Indigenous Stakeholders to preserve the culture of spur lanes by protecting customary forests, limiting the taking of jalan timber and fix track. The private sector plays a role as funding for Pacu Jalur and provides tree saplings for materials for making pathways. So that the cooperation that is built by stakeholders well will create communication that is feedback, a well-planned system, fosters a sense of community care which is formed from coaching and supervision.

Some of the factors that support handling wood as material for making pathways in preserving the culture of the Pacu jalan festival include: (1) Protecting customary forests, (2) Support from the private sector, (3) Known by domestic and foreign tourists. The inhibiting factors are: (1) The role of local government that is not optimal, (2) Quality of Human Resources, (3) The conversion of forest functions to industrial forests.

Keywords: Government, Privat Enterprise, Culture, and Scarcity of Timber.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki banyak sekali destinasi pariwisata yang sangat menarik untuk dinikmati, dan tidak hanya itu destinasi pariwisata di Indonesia juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Kekayaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke tentu saja jika dikelola dengan baik tentu dapat dijadikan sebagai potensi untuk memakmurkan rakyat dan memajukan Indonesia. Oleh karena itu destinasi pariwisata ini juga menjadi salah satu tujuan utama pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di Indonesia, yang sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan yang berbunyi, “Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia ditengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.”

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang ini telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian perubahan kedua yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang no 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan penyerahan wewenang dari pemerintah kepada pemerintah daerah. Sistem ini membawa implikasi semakin besarnya tanggung jawab dan tuntutan untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka menopang pembangunan di daerah.

Kabupaten Kuantan Singingi saat ini pemerintah daerah sedang berupaya dalam mengembangkan destinasi pariwisata yang menjadi ikon Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Festival Pacu Jalur. Festival Pacu Jalur yang diikuti oleh Kabupaten Tetangga seperti Indragiri Hulu, Siak dan Pelelawan pada tahun ini mendapatkan Rekor MURI yaitu peserta pacu jalur terbanyak karena dalam Festival ini diikuti oleh 175 jalur dengan 9.625 anak pacu atau peserta. Ini terjadi karena pada satu desa bisa bisa mengirimkan satu sampai dua buah jalur.

Untuk mencari bahan pembuatan jalur akhir-akhir ini banyak dijumpai di daerah Mudik Kuantan singingi seperti didaerah Lubuk Jambi dan Hulu Kuantan. Meskipun disana masih dibidang banyak akan tetapi dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun mendatang pasti sudah akan habis dikarenakan banyak desa yang membuat jalur itu setahun sekali. Meskipun sudah ditentukan pemerintah kalau jalur dalam satu desa hanya boleh membuat satu dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun akan tetapi masih banyak desa yang melanggarnya karena tidak ada peraturan yang tegas dalam hal ini.

Pacu Jalur awalnya adalah kegiatan yang digunakan untuk

merayakan hari ulang tahun Ratu Wilhelmina (Penguasa Belanda). Pada masa penjajahan, setiap tahunnya Pacu Jalur digelar untuk memperingati bertambahnya umur sang ratu. Namun, saat Indonesia merdeka, Pacu Jalur tak lagi digunakan sebagai penanda hari ulang tahun Ratu Belanda. Pacu Jalur lantas digelar saban hari raya Islam seperti saat Idul Fitri.

Jalur adalah salah satu alat transportasi air masyarakat Kuantan Singingi. Perahu yang terbuat dari kayu gelondongan ini bisa digunakan sebagai alat perhubungan dan perdagangan, akan tetapi lambat laun jalur berubah fungsi menjadi sarana lomba untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Jadi, Pacu Jalur adalah sebuah perlombaan mendayung di sungai kuantan menggunakan perahu panjang yang terbuat dari kayu pohon.

Panjang perahu ini bisa mencapai 25 hingga 40meter dengan garis tengah 1-2meter dan diisi 40-60 orang. Untuk itu mencari kayu dengan ciri-ciri diatas memanglah sangat sulit, karena tidak hanya besar dan panjang, kayu untuk pembuatan jalur juga tidak sembarangan, kayu harus memiliki batang yang padat tidak memiliki batang yang busuk, selain itu kayu jalur tidak boleh memiliki tekstur terlalu keras dan terlalu lunak, karena jika jalur keras maka jalur yang akan digunakan tidak akan laju dan jika terlalu lunak makan jalur akan cepat lapuk.

Dalam proses pencarian kayu untuk pembuatan sebuah jalur Pemerintah Daerah dalam hal ini yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing desa untuk mencari kayu jalurnya sendiri dengan catatan menggunakan jangka waktu 3 sampai 5 tahun sekali yang bertujuan

agar desa tidak membuat jalur disetiap tahunnya. Desa yang akan membuat jalur biasanya langsung menghubungi pihak terkait atau oraang yang memiliki hak atas kayu tersebut. Karena biasanya kayu jalur banyak terdapat di lahan milik desa setempat. Berikut ini anggaran pembuatan jalur di Kelurahan Beringin Jaya pada tahun 2019.

Kemudian salah satu penyebab yang juga mengakibatkan stok pembuatan kayu jalur yang sangat menipis adalah para penebang liar yang menebang kayu hutan untuk dijadikan perkebunan. Pemerintah Daerah menggandeng tokoh Adat, Komunitas Pencinta Lingkungan (KPL) dan PT RAPP dalam mensosialisasikan peraturan pengelolaan hutan. Sebagai perusahaan yang mengelola hutan secara lestari, RAPP diminta untuk membantu masyarakat dalam menjaga hutan adat.

Pemerintah daerah juga menyuruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki HGU (Hak Guna Usaha) kedepan harus mengalokasikan lahan untuk hutan budaya. Hutan budaya adalah sebagai salah satu sumber bahan baku kayu jalur dimasa yang akan datang. Belakangan ini masyarakat di Kuantan Singingi merasakan susahnya mencari kayu untuk dijadikan jalur. Apa yang dirasakan masyarakat juga membuat pihak Dinas Kehutanan Kuantan Singingi selaku pengelola kawasan hutan, prihatin terkait stok kayu untuk bahan kayu jalur tersebut kian menipis. Padahal pacu jalur adalah budaya dan tradisi besar yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang harus dipertahankan sampai kapanpun. Kayu besar yang biasanya dijadikan untuk sebuah jalur adalah jenis kayu meranti, kruing, balam, kompe, marsawa dan

sebagainya saat ini hanya terdapat di kawasan hutan lindung.

Seiring berjalannya waktu hutan di kabupaten Kuantan Singingi semakin punah. Alih fungsi hutan menjadi kebun sawit kian tak terbendung. Ada saja korporasi berkedok koperasi merambah hutan untuk perluasan kebun mereka. Pemerintah seakan tidak mampu menyelamatkan hutan dari gempuran para cukong. Dengan dalih perbaikan ekonomi, para cukong semakin bebas meluluhlantakkan hutan demi ekspansi usaha perkebunan.

Luluh lantahnya hutan tidak hanya akan mengancam kehidupan, namun juga akan mengancam kelangsungan tradisi pacu jalur. Jika hutan tempat kayu untuk bahan pembuatan kayu sudah habis, maka bahan dari kayu tersebut akan diganti dengan Fiber (Plastik Berserat). Akan tetapi jika bahan pembuatan kayu jalur itu diganti maka akan mengurangi ciri khas pacu jalur ataupun nilai budaya yang sudah melekat pada tradisi pacu jalur sejak jaman dahulu. Beberapa hal yang akan hilang jika bahan pembuatan kayu jalur itu diganti dengan Fiber yaitu tidak ada lagi istilah Maelo Jalur, Melayur jalur, dan Pawang (dukun Jalur).

Rasa kekhawatiran akan kepunahan hutan di kabupaten Kuantan Singingi perlu kita perhatikan, sebab dari mana lagi kita akan mendapatkan kayu untuk jalur kalau bukan dari hutan rimba. Jika kita dan para pemangku kepentingan (Stakeholder) tidak mampu menjaga hutan, maka 20-50 tahun lagi tradisi pacu jalur mungkin hanya tinggal sejarah belaka. Oleh karena itu di kabupaten Kuantan Singingi kerjasama stakeholder dalam mengatasi kayu jalur untuk melestarikan festival pacu jalur memang menjadi faktor utamanya, seperti meliputi penduduk lokal,

pemerintah, kelompok masyarakat, sektor swasta dan pihak lain yang secara tidak langsung terkait dengan pelestarian tersebut.

Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan fungsi yang berbeda yang perlu dipahami agar pelestarian kebudayaan di suatu daerah dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Menurut Hetifah Tutik (2014: 825) menjelaskan bahwa stakeholders merupakan individual, kelompok masyarakat dan organisasi baik itu laki-laki maupun perempuan yang memiliki sebuah kepentingan atau dipengaruhi (secara positif maupun negative) dalam suatu kegiatan atau program pembangunan. Pelestarian kebudayaan pada hakekatnya melibatkan 3 Stakeholder yang saling terkait yaitu pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.

Pacu jalur adalah tradisi yang memiliki unsur magis karena terbuat dari kayu yang memiliki Mambang (Sejenis Makhluk Halus) maka peran seorang pawang sangat besar didalam pembuatan sampai dengan jalur itu mengikuti perlombaan. Tidak hanya itu, tradisi maelo (menarik) dan melayur (memanggag) juga akan hilang jika bahan kayu itu diganti dengan Fiber. Oleh karena itu sangat disayangkan jika kita mengganti bahan pembuatan jalur tersebut yang berasal dari kayu menjadi berbahan dasar Fiber. Oleh karena kerjasama Stakeholders yang menjadi faktor penting dalam menangani permasalahan terkait kelangkaan kayu untuk bahan pembuatan jalur, Pemerintah daerah, Pihak Swasta dan Masyarakat Adat harus saling membantu dalam pelaksanaannya. Untuk pencarian kayu selain di hutan adat terdapat juga ditemukan di area perusahaan PT. RAPP, untuk

mendapatkan kayu di daerah tersebut perlu adanya izin dari perusahaan.

Guna pemenuhan kebutuhan dan terkait dengan izin penebangan kayu untuk bahan baku pembuatan jalur baru pada festival Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi, bertempat di Aula Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dilaksanakan rapat antara Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Forum Kades se-Kabupaten Kuantan Singingi, UPT Kemen LHK, PT. RAPP dan Pemprov Riau.

Dalam pertemuan tersebut didapat 3 point kesepakatan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan kayu untuk bahan baku pembuatan jalur baru yakni:

1. PT RAPP bersedia membantu menyediakan kebutuhan kayu untuk pembuatan jalur
2. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi segera menerbitkan surat keputusan penetapan jumlah kebutuhan kayu untuk pembuatan jalur.
3. Pemerintah Provinsi Riau memfasilitasi kebutuhan kayu bulat untuk jalur melalui hutan adat yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Masyarakat adat Kabupaten Kuantan Singingi.

Perlu adanya sinergi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat agar sesuai dengan paradigma Good Governance yang mengedepankan keterpaduan antar pemerintah (State), pihak swasta (private) dan masyarakat (society). Namun permasalahan dilapangan sering kali karena kurangnya keterlibatan stakeholders lain. Menurut Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi,

yang berbunyi “Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pariwisata dan kebudayaan. Disini saya sebagai penulis ingin mengetahui peran apa saja yang akan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menangani masalah kelangkaan kayu untuk bahan pembuatan jalur demi melestarikan budaya atau festival pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan mengenai kebutuhan kayu jalur untuk melestarikan budaya pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

1. Permasalahan seperti mulai berkurangnya kayu yang menjadi bahan untuk pembuatan kayu jalur. Karena dalam memilih kayu untuk pembuatan jalur harus memiliki beberapa syarat, seperti kayu jalur harus memenuhi persyaratan kualitas (jenis), ukuran dan lain-lain, terutama bobot magis atau spiritualnya. Kayu untuk pembuatan jalur harus lurus sekitar 25-40meter, garis tengah 1-2meter dan mempunyai mambang (sejenis makhluk halus). Yang membuat kayu jalur yang sudah ditebang menjadi tidak bisa dipakai adalah jika pada tengah kayu busuk. Untuk mencari kayu dengan syarat seperti itu maka harus menunggu waktu yang lama, karena kayu yang digunakan biasanya berumur sekitar 50 tahunan ke atas. Inilah penyebab kelangkaan kayu untuk pembuatan jalur. Saat ini banyak dijumpai jalur yang hanya mementingkan prestasi semata tanpa mengedepankan tradisi, karena jalur ini dibuat menjadi tipis agar mudah didayung sehingga jalur tersebut tidak akan bertahan lama.

2. Selain kelangkaan kayu dalam pembuatan jalur, kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta terkait

juga sangat penting bagi pelestarian ini, karena pemerintah bisa membuat program ataupun berbagai cara agar masalah yang terjadi dalam pelestarian budaya Pacu jalur itu cepat ditangani seperti masalah kelangkaan kayu untuk pembuatan jalur. Pemerintah kabupaten Kuantan Singingi sebenarnya juga sudah membuat program penanaman untuk pembuatan kayu jalur. Akan tetapi itu saja tidak cukup karena kayu yang digunakan untuk pembuatan jalur tersebut adalah kayu yang berumur sekitar 50 tahun keatas, dan umur rata-rata sebuah jalur yang masih bisa digunakan adalah tidak lebih dari sepuluh tahun. Oleh karena itu jika menunggu program itu saja maka bisa jadi Festival Pacu Jalur ini sudah tidak lagi terlaksana dalam kurun waktu dua puluh tahun mendatang.

3. Pemerintah Daerah menggandeng tokoh Adat, Komunitas Pencinta Lingkungan (KPL) dan PT RAPP dalam mensosialisasikan peraturan pengelolaan hutan. Sebagai perusahaan yang mengelola hutan secara lestari, RAPP diminta untuk membantu masyarakat dalam menjaga hutan adat. Untuk sepuluh tahun kebelakang ini banyak desa yang membuat jalur hanya untuk mendapatkan prestasi tertinggi dan bukan untuk sekedar melestarikan budaya, jika jalur sudah dibuat akan tetapi tidak mendapatkan hasil yang baik maka jalur itu akan diperbaiki lagi dan jika masih belum mendapatkan hasil yang memuaskan lagi maka jalur akan dibiarkan begitu saja sampai lapuk dan akan mencari kayu jalur kembali. Akhir-akhir ini juga banyak dijumpai kalau jalur yang dibuat itu tipis agar jalur tersebut menjadi kencang dan ringan untuk di dayung sehingga bisa mendapatkan juara, akan tetapi itu

adalah sebuah kesalahan karena jalur yang tipis itu tidak akan bertahan lama.

LANDASAN TEORI

A. Kerjasama

Kerjasama merupakan sesuatu yang ditangani oleh beberapa pihak. Kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Landsberger (2011) kerjasama atau belajar bersama adalah proses berkelompok dimana anggota-anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat. Selain itu kemampuan kerjasama mampu meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berinteraksi, serta melatih peserta didik beradaptasi dengan lingkungan baru.

Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan fungsi yang berbeda yang perlu dipahami agar pelestarian kebudayaan di suatu daerah dapat terwujud dan terlaksana dengan baik.. Pelestarian kebudayaan pada hakekatnya melibatkan 3 Stakeholder yang saling terkait yaitu pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Kerjasama merupakan salah satu strategi yang digunakan dalam mendukung keberhasilan pengembangan sumber daya maupun kelembagaan, Jadi dibutuhkan kesepahaman bersama dalam melakukan pengelolaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program untuk pengembangan wisata budaya tersebut guna tercapainya tujuan bersama.

B. Stakeholders

Menurut Hetifah Tutik (2014: 825) menjelaskan bahwa *stakeholders*

merupakan individual, kelompok masyarakat dan organisasi baik itu laki-laki maupun perempuan yang memiliki sebuah kepentingan atau dipengaruhi (secara positif maupun negative) dalam suatu kegiatan atau program pembangunan. Pelestarian kebudayaan pada hakekatnya melibatkan 3 *Stakeholder* yang saling terkait yaitu pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Stakeholders dibagi menjadi 3 kelompok, antara lain:

1. *Stakeholders* Primer

Merupakan *stakeholders* yang terkena dampak secara langsung baik dampak positif maupun dampak negatif dari suatu rencana serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. *Stakeholders* yang memiliki pengaruh dan kepentingan dikatakan sebagai *stakeholders* primer dan harus dilibatkan penuh dalam tahapan-tahapan kegiatan.

2. *Stakeholders* Kunci

Stakeholder kunci adalah mereka yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan. Di dalam penelitian ini *stakeholders* kunci adalah *stakeholders* yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengembangan suatu proyek atau kegiatan.

3. *Stakeholders* Sekunder atau Pendukung

Stakeholders pendukung merupakan *stakeholders* yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan. *Stakeholders* pendukung menjadi fasilitator dalam proses pengembangan suatu kegiatan dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. *Stakeholders* pendukung meliputi

para investor atau pihak swasta, LSM, dan peneliti¹.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran langsung tentang “Perang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengatasi kebutuhan kayu jalur dalam melestarikan festival pacu jalur tahun 2019. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam melakukan penelitian, penulis membagi jadwal kedalam beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap persiapan yaitu tahap pengumpulan data
- b. Tahap penelitian yaitu pelaksanaan kegiatan riset lapangan

¹ Tutik, Tutik. "Peran Stakeholder dalam Pengembangan Tebu Rakyat (Studi pada Wilayah Kerja Pabrik Gula Redjosarie Kabupaten Magetan)." *Jurnal Administrasi Publik* 2.5 (2014): 823-829.

c. Tahap pengelolaan data yang dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh langsung di lapangan

d. Tahap pelaporan yaitu penyusunan sumber data dan penyuntingan naskah.

Untuk dapat mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti, penulis menggunakan informan yang dinilai layak dan memiliki informasi tentang subyek yang akan diteliti. Dalam menentukan informan penulis menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan informan dengan memilih unsur-unsur tertentu yang dianggap penting dan benar-benar mengetahui informasi mengenai permasalahan penelitian.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu:

Tabel Informan Penelitian

N o	Nama Informan	Jabatan/Kedudukan
1	Dr. H. Indra Suandy	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi.
2	Maulina Reza	Kepala Bidang Kesenian Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi.
3	Abriman	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Kuantan Singingi.
4	M. Yusuf (Dt. Simarajo)	Penghulu Pucuk Kenegrian Toar
5	Khairil Anwar (Dt. Bandaro)	Urang Godang IV Koto Gunung
6	Apriliyusm	Pemangku Adat Koto

.	an (Datuk Penghulu Malin)	Sentajo
7	Sugito	Ketua Pengurus Jalur Kelurahan Beringin Jaya Kec. Sentajo Raya

Sumber: olahan peneliti 2021

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerjasama Stakeholders Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mengatasi Kelangkaan Kayu Jalur Tahun 2019

Dalam melestarikan suatu kebudayaan, tentu banyak permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya, kerjasama stakeholder sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan atau pelestarian budaya dan bila dikembangkan dengan baik maka akan menjadi suatu potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Seiring berjalannya waktu hutan di kabupaten Kuantan Singingi semakin punah. Alih fungsi hutan menjadi kebun sawit kian tak terbendung. Ada saja korporasi berkedok koperasi merambah hutan untuk perluasan kebun mereka. Pemerintah seakan tidak mampu menyelamatkan hutan dari gempuran para cukong. Dengan dalih perbaikan ekonomi, para cukong semakin bebas meluluhlantahkan hutan demi ekspansi usaha perkebunan.

Luluh lantahnya hutan tidak hanya akan mengancam kehidupan, namun juga akan mengancam kelangsungan tradisi pacu jalur. Rasa kekhawatiran akan kepunahan hutan di kabupaten Kuantan Singingi perlu kita perhatikan, sebab dari mana lagi kita akan mendapatkan kayu untuk jalur kalau bukan dari hutan rimba. Jika kita dan para pemangku kepentingan (Stakeholders) tidak mampu menjaga hutan, maka 20-50 tahun lagi tradisi

pacu jalur mungkin hanya tinggal sejarah belaka. Oleh karena itu di kabupaten Kuantan Singingi kerjasama stakeholder dalam mengatasi kayu jalur untuk melestarikan festival pacu jalur memang menjadi faktor utamanya, seperti meliputi penduduk lokal, pemerintah, kelompok masyarakat, sektor swasta dan pihak lain yang secara tidak langsung terkait dengan pelestarian tersebut.

Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan fungsi yang berbeda yang perlu dipahami agar pelestarian kebudayaan di suatu daerah dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Menurut Hetifah Tutik (2014: 825) menjelaskan bahwa stakeholders merupakan individual, kelompok masyarakat dan organisasi baik itu laki-laki maupun perempuan yang memiliki sebuah kepentingan atau dipengaruhi (secara positif maupun negative) dalam suatu kegiatan atau program pembangunan. Pelestarian kebudayaan pada hakekatnya melibatkan 3 Stakeholder yang saling terkait yaitu pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan stakeholder dalam melestarikan festival pacu jalur yang ada di kabupaten Kuantan Singingi. Dalam penelitian yang mengkaji tentang Kerjasama Stakeholder Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mengatasi Kelangkaan Kayu Jalur Tahun 2019 dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Landsberger.

1. Kerjasama Stakeholders Daerah

Kerjasama berarti itu suatu upaya yang dilakukan setiap organisasi guna untuk meningkatkan kinerja organisasi dan memajukan suatu organisasi. Upaya menjalin kerjasama antar organisasi

dapat menjelma menjadi sebuah kekuatan bagi kelembagaan tersebut. Cara menjalin kerjasama antara organisasi haruslah digalakan di dalam suatu organisasi, untuk kemajuan dan menghidupkan kembali kekompakan organisasi itu sendiri.

Di dalam melestarikan sebuah kebudayaan yang sudah terjadi secara turun temurun tentu tidaklah mudah, apalagi unsur kebudayaan itu melibatkan sumber daya alam, Pacu Jalur sebagai contohnya yang menggunakan kayu yang sangat besar dalam pembuatannya. Oleh karena itu Pemangku kepentingan seperti Pemerintah, Masyarakat dan Pemangku Adat serta Pihak Swasta mempunyai perannya masing-masing dan harus bekerja sama dalam mengatasi kelangkaan kayu untuk pembuatan jalur.

A. Pemerintah Daerah

• Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam rangka pengembangan sektor pariwisata juga mempunyai fungsi dan peran dalam memanfaatkan seoptimal mungkin potensi daerahnya, fasilitas tidak hanya diartikan sebagai pemberian sarana dan prasarana tapi pemerintah juga memberikan pembinaan atau bimbingan secara terus menerus dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merencanakan dan membangun serta melestarikan festival pacu jalur yang sudah ada sejak dahulu.

Dalam mengoptimalkan pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah daerah juga perlu mendorong partisipasi pihak lain para *Stakeholder* yang berkompeten dalam pelestarian kebudayaan Pacu Jalur di kabupaten Kuantan Singingi. Pemerintah juga perlu mendorong terjadinya koordinasi dan kerjasama

antar stakeholder. Dalam pelestarian kebudayaan peran pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator yaitu :

- a. Menyediakan Sarana dan Prasarana
- b. Menyediakan Modal
- c. Pendidikan dan Pelatihan
- d. Penyediaan Penyuluhan dan Pendampingan

- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang berkualitas tentu memegang peranan yang sangat penting dalam pelestarian kebudayaan pacu jalur. Profesionalisme Sumber Daya Manusia merupakan suatu tuntutan dalam menghadapi persoalan tentang masalah pelestarian kebudayaan. Untuk memperoleh Sumber Daya Manusia yang professional tentu tidak mudah, akan tetapi bukan tidak mungkin.

Dengan membangun Sumber Daya Manusia yang professional maka akan ikut membantu dalam pelestarian budaya Pacu Jalur yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Karena jika Sumber Daya Manusia itu tinggi otomatis mindset masyarakat Kuantan Singingi akan mengerti dan mengetahui apa yang akan terjadi jika kebutuhan kayu untuk kelestarian budaya Pacu Jalur ini menjadi langka, tentu akan berakibat pada keberlangsungannya budaya Pacu Jalur ini.

Dan saat pembuatan jalur tidak hanya mengejar prestasi saja melainkan dengan tujuan melestarikan budaya. Karena belakangan ini banyak desa yang membuat jalur itu setipis mungkin agar bisa melaju dan meraih juara, jadi jalur tersebut tidak akan bertahan lama.

- Promosi

Promosi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan sesuatu kearah yang lebih baik. Karena dengan adanya promosi ini bisa memperkenalkan

sesuatu agar dapat dikenal lebih luas. Dalam kebudayaan juga ada yang dimaksud dengan Promosi Kebudayaan, yaitu usaha mempromosikan bidang kebudayaan dalam rangka mendukung keberagaman budaya agar terus berlangsung dan mengalami regenerasi setiap tahunnya.

Tujuan dari promosi kebudayaan ini untuk memperkenalkan budaya Pacu Jalur yang telah berlangsung lama di Kabupaten Kuantan Singingi agar menarik para wisatawan lokal atau mancanegara. Dengan harapan agar masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi pada khususnya bisa sadar betapa pentingnya budaya Pacu Jalur ini dan tidak mengubah hutan untuk mencari kayu jalur menjadi lahan perkebunan pribadi.

- Menyelenggarakan Event Daerah

Menyelenggarakan event daerah bertujuan untuk memberi pemasukan kepada pemerintah daerah agar bisa memperbaiki segala aspek dalam pelaksanaan festival Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi, seperti Infrastruktur untuk para wisatawan dan anggaran untuk desa agar bisa membantu dalam perawatan jalur untuk bisa bertahan dengan waktu yang lama.

B. Masyarakat Dan Pemangku Adat

- Menjaga Hutan Adat

Sebagai sumber utama dalam mencari kayu untuk pembuatan jalur dalam melestarikan kebudayaan pacu jalur, hutan di Kabupaten Kuantan Singingi sangat berperan penting. Jika tidak dijaga dengan baik tentu saja akan mengakibatkan semakin berkurangnya hutan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut. Keberadaan hutan di Kuantan Singingi ini sudah mulai terancam keberadaannya, mulai dari penumbangan kayu secara ilegal sampai

dengan pengalihan hutan menjadi perkebunan. Maka dari itu masyarakat dan Pemangku Adat harus ikut menjaga keselamatan hutan agar kerusakan tidak berlanjut terus menerus.

- **Membatasi Pengambilan Kayu**

Ketika mencari kayu untuk bahan pembuatan jalur masyarakat tidak boleh egois dalam pengambilannya, maksudnya adalah meskipun kayu yang didapat untuk pembuatan jalur itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, masyarakat tidak boleh mencarinya kembali sebelum lima tahun, karena pemerintah sudah menetapkan pengambilan kayu jalur hanya boleh dilakukan lima tahun sekali untuk satu desa. Akan tetapi masih banyak yang tidak menghiraukan dan memikirkan dampaknya.

- **Memperbaiki Jalur**

Semakin hari kita tahu bahwa keberadaan kayu jalur sudah mulai berkurang, oleh karena itu daripada kita mencari kayu lagi di hutan, lebih baik kita memperbaiki kayu jalur yang sudah ada. Dengan ini keberadaan kayu di hutan tidak terlalu berkurang secara signifikan, dan biaya yang digunakan untuk perbaikan jalur juga bisa dibilang lebih sedikit.

C. Pihak Swasta

- **Memberi Bantuan Bibit Pohon**

Seperti yang diketahui bahwa kelangkaan kayu jalur ini adalah masalah terbesar dalam pelestarian budaya festival pacu jalur, karena kayu inilah sebagai dasar pembuatannya. Oleh karena itu PT. RAPP dalam hal ini sebagai pihak ketiga yang ikut melestarikan budaya pacu jalur ikut ambil bagian dalam mengatasi kelangkaan kayu untuk pembuatan jalur tersebut.

Pada tahun 2015 PT. RAPP memberikan sebanyak 30 bibit pohon jenis Meranti, Kruing, dan Balam diserahkan kepada Pusat Studi Budaya Melayu (PSBM) sekaligus Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat - Universitas Riau (LPPM-UR). Bibit pohon tersebut akan ditanam di lingkungan Kampus UR Panam sebagai salah satu upaya pelestarian bahan baku pembuat Jalur. RAPP juga sudah mengembangkan bibit kayu jalur di lahan konservasi seluas 117,5 hektar sejak 7 tahun yang lalu yang bertujuan selain membantu mengembalikan fungsi hutan, juga ikut serta dalam melestarikan budaya kebanggaan masyarakat Kuantan Singingi.

- **Pendanaan Pacu Jalur.**

Selain bintuan untuk bibit kayu untuk pembuatan jalur, PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) juga memberikan kontribusi sangat tinggi dalam pelaksanaan festival pacu jalur ini.

1. Membangun Komunikasi Yang Bersifat Umpan Balik

Komunikasi yang bersifat umpan balik merupakan dasar untuk melihat apakah proses komunikasinya efektif atau tidak. Komunikasi dikatakan efektif jika komunikator dan komunikan mencapai kesamaan makna. Oleh karena itu Stakeholder saling berkerja sama dalam menanggapi masalah yang terjadi terkait kelangkaan kayu jalur. Dalam menanggapi permasalahan tentang kayu untuk pembuatan jalur, kita harus berpedoman kepada UU No 23 Tahun 2014 dimana kewenangan urusan Kehutanan telah dilimpahkan dari Dinas Kabupaten ke Provinsi. Maka dalam rangka mendukung kelestarian even budaya daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas

Lingkungan Hidup dan kehutanan telah memfasilitasi pemenuhan kebutuhan kayu untuk pembuatan jalur pada event budaya daerah pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi.

Secara umum dalam rapat tersebut telah dirumuskan beberapa alternatif kebijakan, yaitu :

a. Jangka Pendek

- PT RAPP diminta untuk dapat memenuhi kebutuhan kayu selama dua tahun

- Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau akan mengkonsultasikan terkait hal tersebut ke Kementerian LKH (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) terkait rencana pemanfaatan kayu jalur.

b. Jangka Panjang

- Mengkaji dan mempersiapkan guna pembentukan hutan adat di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga dapat memenuhi kebutuhan jalur dimasa yang akan datang.

- Pembuatan Peraturan Pemanfaatan kayu hutan adat melalui Peraturan Daerah.

2. Terbangunnya Sistem-Sistem Yang Terencana Dengan Baik

Terbangunnya sistem-sistem yang terencana dengan baik merupakan proses hubungan antara Pemerintah Daerah beserta Stakeholders terkait untuk mengatasi kelangkaan kayu jalur. Dengan adanya sistem yang baik di dalam suatu organisasi maka akan gampang organisasi itu mengelola dan meningkatkan kemajuan suatu organisasi tersebut. Dalam sebuah organisasi Stakeholders harus terbangun sistem-sistem yang saling mendukung satu dengan yang lainnya sehingga terjalin kerjasama, kerjasama di dalam suatu organisasi sangat penting dan itu langkah awal dalam mencapai tujuan bersama.

3. Menumbuhkan Rasa Peduli Masyarakat

Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan serta bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Dan juga sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Orang-orang peduli adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka member inspirasi, perubahan, kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya. Ketika menyaksikan kondisi masyarakat maka dirinya akan tergerak melakukan sesuatu. Menumbuhkan rasa peduli masyarakat sangatlah penting agar saling menjaga dan mengingatkan satu dengan yang lain jika terjadi kesaalahan dan permasalahan, dan juga menumbuhkan rasa peduli masyarakat agar semua masyarakat bisa membantu secara sukarela dan bahu membahu untuk tercapainya tujuan bersama.

4. Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan

Pemerintah Daerah menyerahkan sepenuhnya kepada Niniek Mamak (Tokoh Adat) dalam melakukan pengawasan, apabila terjadi pelanggaran atau masalah maka Niniek Mamak akan melaporkan kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah akan turun tangan untuk melakukan pembinaan. Dengan adanya komunikasi antar pemerintah daerah dan tokoh adat, pasti pengawasan dan pembinaan bisa berjalan dengan baik untuk mengatasi permasalahan terhadap kebutuhan kayu jalur.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Stakeholder Dalam Mengatasi Kebutuhan Kayu Jalur Untuk Melestarikan

Festival Pacu Jalur Di Kabupaten Kuantan Singingi

A. Faktor Pendukung

Berdasarkan penggalan informasi yang telah dilakukan oleh penulis terdapat beberapa faktor yang mendukung dalam mengatasi kayu untuk bahan pembuatan jalur dalam melestarikan kebudayaan festival Pacu jalur antara lain:

a. Menjaga Hutan Adat

Di berbagai desa di kabupaten Kuantan Singingi memiliki hutan adatnya sendiri, hutan adat atau masyarakat setempat dengan nama Hutan Larangan juga termasuk tempat dimana kayu jalur ini berasal. Hutan adat di Kuantan Singingi memiliki luas sekitar 1.297 hektar yang berada di 16 titik. Hutan ini masih tetap lestari dan terjaga dengan baik oleh masyarakat dan ditanami beberapa jenis kayu, oleh karena itu tidak sembarang orang bisa mengambilnya, sebab untuk kepentingan masyarakat juga di cadangkan untuk kayu bahan pembuatan jalur.

b. Suport Pihak Swasta

Dengan adanya partisipasi dari pihak swasta ini, memberikan bantuan yang sangat penting dalam melestarikan budaya pacu jalur yang sudah mulai terancam keberadaannya karena masalah kelangkaan kayu untuk pembuatan jalur. Dengan bantuan yang diberikan itu bisa digunakan untuk biaya perawatan jalur maupun perbaikan jalur sehingga jalur tersebut mempunyai jangka waktu yang lama untuk tetap digunakan dalam pelaksanaan festival pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi.

c. Dikenal Banyak Wisatawan Dalam Maupun Luar Negeri

Pacu jalur yang mendapatkan penghargaan Anugrah Pesona Indonesia (API) dalam kategori Pariwisata Terpopuler yang diserahkan langsung oleh Bapak Ukus Kuswara (Sekretaris Jendral Dinas Menteri Pariwisata) dan di siarkan dalam salah satu stasiun Televisi Nasional, tentu juga dapat menarik wisatawan Domestik ataupun Mancanegara untuk dapat melihat festival kebanggaan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Faktor Penghambat

1. Peran Pemerintah Daerah Kurang Maksimal

Kurang maksimalnya pemerintah daerah untuk menjalankan perannya, seperti memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga hutan untuk tempat mencari kayu pembuatan jalur. Padahal ini adalah langkah awal untuk menyadarkan masyarakat tentang betapa pentingnya untuk melakukan pelestarian budaya pacu jalur.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Faktor utama dalam mengatasi kelangkaan kayu jalur ini adalah kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Jumlah penduduk yang besar apabila tidak diikuti oleh sumber daya manusia yang memadai, hanya akan menjadi penghambat pelestarian budaya. Permasalahan yang terjadi pada akhir-akhir ini banyak masyarakat ketika membuat jalur hanya mementingkan prestasinya saja tanpa melihat dampak yang ditimbulkan setelahnya. Mereka membuat jalur yang tipis agar jalur tersebut ketika di dayung bisa menjadi ringan dan laju, kemudian jika jalur yang dibuat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan maka jalur

tersebut akan dibiarkan sampai rusak dengan sendirinya.

3. Beralih Fungsinya Hutan Menjadi Hutan Industri

Kemudian yang menjadi faktor penghambat yaitu meningkatnya deforestasi di Kuantan Singingi, seperti telah beralih fungsinya hutan yang menjadi tempat untuk mencari kayu jalur menjadi hutan industri maupun perkebunan kelapa sawit. Tentu saja perbuatan ini sangat disayangkan menimbang hutan di Kabupaten Kuantan Singingi sudah mulai sedikit keberadaannya, belum lagi aksi pembalakan liar, seperti yang terjadi di hutan lindung Bukit Tabandang di desa Lubuk Ambacang kecamatan Hulu Kuantan. Kayu yang seharusnya bisa digunakan untuk bahan pembuatan jalur justru di olah menjadi bahan untuk kepentingan pribadi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian penulis yang telah di paparkan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan:

Kerjasama *stakeholder* dalam mengatasi kayu jalur untuk melestarikan festival pacu jalur memang menjadi faktor utama, seperti meliputi penduduk lokal, pemerintah, kelompok masyarakat, sektor swasta dan pihak lain yang secara tidak langsung terkait. Peran pemerintah daerah dalam pelestarian Pacu Jalur bertugas untuk membuat kebijakan dan perencanaan yang sistematis. Dengan meningkatkan SDM agar masyarakat bisa memahami dan menyadari tentang pentingnya pelestarian hutan untuk tempat penyediaan bahan kayu jalur, dan memberi peraturan setiap desa hanya boleh membuat jalur 5 tahun sekali.

Pihak swasta sebagai pelaku bisnis mempunyai peran dalam menyediakan sarana pendukung pelestarian budaya pacu jalur, yaitu dengan memberi bantuan bibit pohon yang cocok untuk bahan pembuatan kayu jalur seperti Meranti, Kulim, Kruing dan Balam. Keterlibatan pihak swasta sangat penting dalam pelestarian budaya ini karena disamping menjadi tempat untuk pelestarian kayu jalur pihak swasta juga sebagai donatur dalam festival Pacu jalur yang digelar setiap tahunnya.

Sedangkan masyarakat dan tokoh adat memiliki peran yang tidak kalah penting karena sebagai ujung tombak dilapangan yang menjadi kunci dalam pelestarian kayu jalur. Masyarakat dan tokoh adat harus bisa menjaga kelestarian hutan dengan tidak mengambil kayu seenak dan mengambil sesuai dengan kebutuhan. Karena hutan adat adalah satu-satunya tempat untuk mencari kayu jalur. Kemudian masyarakat juga harus bisa memaksimalkan kualitas kayu jalur, maksudnya yaitu membuat jalur yang memiliki ketebalan yang sesuai, karena banyak dijumpai jalur dibuat tipis agar bisa laju, ini sangat disayangkan karena jalur yang tipis pasti tidak akan bisa digunakan untuk jangka panjang.

Faktor yang mendukung dalam mengatasi kayu untuk bahan pembuatan jalur dalam melestarikan kebudayaan festival Pacu jalur adalah Keikutsertaan masyarakat dalam membantu pemerintah daerah menjaga hutan untuk tempat mencari kayu jalur. Di berbagai desa di kabupaten Kuantan Singingi memiliki hutan adatnya sendiri, hutan adat atau masyarakat setempat dengan nama Hutan Larangan juga termasuk tempat dimana kayu jalur ini berasal.

Selain keterlibatan dari masyarakat dan Tokoh adat dalam pelestarian kebutuhan kayu untuk pembuatan jalur, terdapat juga

keterlibatan dari pihak swasta yang sudah lama ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan budaya pacu jalur ini, mulai dari memberikan bibit kayu untuk pembuatan jalur, dan mengizinkan masyarakat untuk mengambil kayu jalur di area tempat perusahaan, sampai dengan sumbangan dana dan memberikan sponsor kepada beberapa jalur yang ikut dalam kegiatan pacu jalur.

Pacu jalur yang mendapatkan penghargaan Anugerah Pesona Indonesia (API) dalam kategori Pariwisata Terpopuler yang diserahkan langsung oleh Bapak Ukus Kuswara (Sekretaris Jendral Dinas Menteri Pariwisata) dan di siarkan dalam salah satu stasiun Televisi Nasional, tentu juga dapat menarik wisatawan Domestik ataupun Mancanegara untuk dapat melihat festival kebanggaan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

Faktor penghambat dalam mengatasi kelangkaan kayu untuk pembuatan jalur yaitu kurang maksimalnya pemerintah daerah untuk menjalankan perannya, seperti memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga hutan untuk tempat mencari kayu pembuatan jalur. Kualitas sumber daya manusia menjadi penghambat pelestarian budaya. Seperti banyaknya masyarakat ketika membuat jalur hanya mementingkan prestasinya saja tanpa melihat dampak yang ditimbulkan setelahnya. Kemudian meningkatnya deforestasi di Kuantan Singingi, seperti telah beralih fungsinya hutan yang menjadi tempat untuk mencari kayu jalur menjadi hutan industri maupun perkebunan kelapa sawit.

B. SARAN

1. Pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan kinerja dalam melakukan pelestarian budaya ini,

seperti sebagai fasilitator, pemerintah daerah perlu mendorong partisipasi dan mendorong terjadinya koordinasi para *Stakeholder* yang berkompeten dalam pelestarian kebudayaan Pacu Jalur di kabupaten Kuantan Singingi.

2. Pemerintah daerah harus membuat *Memorandum Of Understanding* (MoU) atau Perjanjian Kerjasama dalam kesepakatan yang telah dibuat dalam rapat pemenuhan kebutuhan dan izin pemanfaatan kayu untuk pembuatan kayu jalur.
3. Pihak swasta sebaiknya tidak hanya membantu desa yang memiliki jalur berprestasi saja, melainkan juga desa-desa yang berada jauh dari tepi kuantan agar bisa juga mengikuti event kebudayaan pacu jalur.
4. Masyarakat seharusnya bisa merubah pola pikir mereka tentang pentingnya menjaga tradisi pacu jalur ini, jika mengikuti nafsu yang haus akan prestasi tentu saja akan membuat tradisi ini menjadi terancam keberadaannya.
5. Melakukan Pelestarian hutan yang menjadi aset untuk tempat pencarian kayu jalur dengan cara menjaga hutan dari para oknum yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Kumpulan Buku:

- A.J, Muljadi, *Kepariwisata Dan Perjalanan*,(Jakarta: PT Grafindo Persada,2010)
- Ansell, Crish & Gash, Alison. “ *Collaborative Governance in Theory And Practice*” *Jurnal Of Public Administration Reseach and Theory*. (2007)
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grafindo Persada (2003)
- Hamidy, UU, *Kesenian Jalur Di Rantau Kuantan Riau*, (Riau: Dinas Kebudayaan Kesenian Dan Pariwisata Provinsi Riau,2005)
- Kansil, Cristine S.T *Pemeintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika (2004)
- Malik, Abdul, *Perencanaan Pembelajaran*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta (2016)
- Suwantoro, Gamal, *Dasar-Dasar Pariwisata*. (Yogyakarta: Andi Publising, 1997)
- Yoeti, Oka, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: Angkasa (1993)
- Yoeti, Oka, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: Angkasa (1996)
- Yoeti, Oka, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Jakarta: Angkasa (1982)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pembangunan Kepariwisata.
- Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan

Peraturan Menti Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2014.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi no 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat.

Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi No 15 Tahun 2017. Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

Jurnal dan Skripsi

Deva Adrian Aditya. *Pelestarian kesenian lengger di era modern (Studi kasus kelompok kesenian taruna budaya Desa sedang Sari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo)*.

Lepika Endang Sari.*Peran Stakholder dalam menjaga kebersihan objek wisata Pantai Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agan Provinsi Sumatra Barat*.

Skripsi Desi Hardianti. *Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata Pacu Jalur di kabupaten kuantan singingi tahun 2016-2017*.

Skripsi M. Hafiz Al Gerry. *Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten*

Kampar dalam pengembangan obyek wisata Danau Bakuok di desa Aursati Kecamatan Tambang tahun 2010-2012.

Skripsi Vito Pratama. Pelaksanaan Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Kampar tahun 2015.

Tri Ananda Putri.Strategi pemerintah kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kebudayaan Melayu.